



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI PAPUA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA,

SELASA, 9 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Papua

PEMOHON

1. Partai Solidaritas Indonesia (Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Paus Kogoya (Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Selasa, 09 Juli 2019, Pukul 13.33 - 15.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Alboin Pasaribu
Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Nasrullah.
2. Heriyanto.

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Tantri Maulana
2. Andi Syamsul Bahri
3. Muslimin Mahmud

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Johanis Haryono Maturbongs
2. Sergius Wabiser
3. David Selsius Maturbongs

D. Termohon:

1. Dr. Berna Sudjana
2. Zandra Mambrasar
3. Theodorus Kosay
4. Hasyim Asy'ari
5. Pramono Ubaid Tanthowi
6. Syamsudin Slawat
7. Rizka Threesea Khumala
8. Ani Yusrian
9. Muhammad Fadillah
10. Rian Wicaksana
11. Miftakhul Huda
12. Remana Nugroho
13. Imam Munandar
14. Adi Sunata
15. Tri Juninisvianty

E. Bawaslu:

1. Mochammad Afifuffin
2. Witra Evelin
3. Jamaludin Lado Rua
4. Metusalak Infandi
5. Amandus Situmorang

SIDANG DIBUKA PUKUL 13:33 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Selamat siang. Sidang dalam Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Solidaritas Indonesia, Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini Ketua Umum Wilayah Adat Lapago Provinsi Papua, Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan, dan Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional.

Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

Untuk Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir dalam sidang ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb.

Eh ... selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkanlah kami memperkenalkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia yang hadir pada saat ini eh ... kami berdua sebagai Kuasa Hukum saya sendiri Nasrullah dan rekan saya Mas Heriyanto, terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini Ketua Umum Wilayah Adat Lapago Provinsi Papua, silakan!

Sudah hadir? Belum hadir, ya!

Baik, untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat siang. Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Partai PPP dengan saya sendiri Tantri Maulana, dan rekan sebelah kanan saya Andi Syamsul Bahri, serta rekan di belakang saya Muslimin Mahmud. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, yang ... yang itu di yang di belakang di depan aja kalau masih ada kosong, ya. Itu jatah kursinya ketua adat, tapi belum muncul, ya. Nanti kursinya boleh diduduki, tapi Bapak ndak boleh jadi ketua umum adat, ya.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Selamat siang, salam Sejahtera. Kami mewakili Partai Amanat Nasional. saya sendiri Kuasa Hukum Johanis Haryono Maturbongs. Samping kanan saya, Sergius Wabiser. Di samping kiri, saya Saudara David Selsius Maturbongs, terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, kesempatan berikutnya untuk Pihak Termohon KPU, silakan memperkenalkan diri!

8. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIFTAHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir Prinsipal eh ... Permohon ... Termohon dari KPU provinsi (...)

9. KETUA: ASWANTO

Perkara No 203-11-33 dulu.

10. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIAN WICAKSANA

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang hadir adalah eh ... saya sendiri Rian Wicaksana dan dari Ketua Pe ... Termohon juga Bapak dan Theodorus Kosay dan Anggota Zandra Mambrasar untuk Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

11. KETUA: ASWANTO

250 KPU sudah ... belum hadir? kuasa dan prinsipalnya belum hadir, ya? Untuk Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

12. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Majelis? Instruksi, Majelis?

13. KETUA: ASWANTO

Instruksi apa? Interupsi, bukan instruksi. Instruksi itu perintah, gitu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, interupsi, Majelis

15. KETUA: ASWANTO

He em.

16. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Saya mau sampaikan bahwa Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu ada 2 Pemohon dan 2 Kuasa yang berbeda sebenarnya, Majelis. Tapi dijadikan menjadi satu Nomor Perkara.

17. KETUA: ASWANTO

Oke, nanti kita ... nanti Saudara memperkenalkan diri yang belum memperkenalkan diri tadi.

Jadi untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 eh ... tadi yang Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 belum ada kuasanya, ya? Belum ada Pihak Termohon-nya. Lalu untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan!

18. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIFTAHUL HUDA

Eh ... terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa KPU Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir di persidangan kali ini Prinsipal dari KPU Provinsi Papua. Untuk Kuasa Hukum hadir saya Miftahul Huda dan Remana Nugroho.

19. KETUA: ASWANTO

Baik.

20. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIFTAHUL HUDA

Terima kasih.

21. KETUA: ASWANTO

Untuk Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

22. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAMSUDIN SLAWAT

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Termohon Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir Prinsipal dari KPU Provinsi Papua dan saya Kuasa Hukum Samsudin Slawat, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Baik, ini kan Perkara No 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga mestinya Prinsipal-nya. Prinsipal Termohon kan mestinya KPU provinsi atau tidak ... itu tidak di wilayah Anda itu? Atau ya karena KPU paham ini ketua umum wilayah adat nanti diselesaikan secara adat saja, begitu ya?

Baik, selanjutnya Pihak Terkait tolong disampaikan Nomor Pihak Terkait untuk nomor perkara yang mana.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMIL BURHANUDIN (PDIP)

Terima kasih, Yang Mulia kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 saya sendiri Kuasa Hukum Jamil

Burhanudin dan samping kiri saya Slamet Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Baik, Partai Amanat tadi, ya? Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Baik. Pihak Terkait yang lain?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI (PKS)

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

27. KETUA: ASWANTO

Oke

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI (PKS)

Terima kasih.

29. KETUA: ASWANTO

Masih ada lagi yang jadi Pihak Terkait? Silakan!

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI (PKS)

Saya Aristya dan ini Bu Devianti Dwi Ningsih, maaf, Majelis.

31. KETUA: ASWANTO

Oh timnya, ya?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI (PKS)

Ya.

33. KETUA: ASWANTO

Oke. Untuk yang tim lain?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SAIDI TARIGAN (NASDEM)

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Nasdem Pihak Terkait dari Perkara Nomor 203/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir di sini. Saya Ridwan Saidi Tarigan, di sini ada Tan Irawan. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada lagi Pihak Terkait yang (...)

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO (PPP)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia (...)

37. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO (PPP)

Perkenalkan kami Pihak Terkait dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Perkara Nomor 203/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

39. KETUA: ASWANTO

Baik.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO (PPP)

Saya bersama dengan rekan saya, saya Akhmad Leksono dengan rekan Abdullah dan rekan Bachtiyar. Terima kasih.

41. KETUA: ASWANTO

Baik. Pihak Terkait sudah semua? Baik, selanjutnya Bawaslu RI.

42. BAWASLU: MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami dari Bawaslu RI, saya Mochammad Afifuddin, Komisioner. Dan Tim Hukum kita di belakang dan juga dari Bawaslu provinsi, Pak Jamaluddin. Terima kasih.

43. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. (...)

44. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAMSUDIN SLAWAT

Yang Mulia? Tambahan, Yang Mulia, dari Termohon.

45. KETUA: ASWANTO

Silakan!

46. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAMSUDIN SLAWAT

Hadir Pak Hasyim untuk semua perkara dari Pihak Termohon.

47. KETUA: ASWANTO

Baik, oke. Terima kasih. Tadi yang dari PAN?

48. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, Yang Mulia. Dari PAN juga kami Nomor Perkaranya sama dengan 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, hanya saja (...)

49. KETUA: ASWANTO

Ada 2?

50. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, 2 Kuasa dan dari Termohon yang berbeda.

51. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini sesuai dengan dapil, ya? Siapa nama Saudara?

52. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Perkenalkan, Majelis, nama saya Wahyudi Jarmanto. (...)

53. KETUA: ASWANTO

Ada tim yang lain?

54. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Dan di samping saya ada Ahmad Husein dan Salman Huseini [sic!].

55. KETUA: ASWANTO

Jangan lupa perkenalkan timnya. (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Baik, Majelis.

57. KETUA: ASWANTO

Nanti orang enggak kenal timnya. Nanti kalau ndak diperkenalkan ndak ada bagiannya. Untuk menyampaikan maksud saya, menyampaikan. Ada bagian untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, gitu. Bukan bagian yang lain-lain, itu kan urusan Bapak yang bagian lain itu.

Baik kita mulai dari Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Dan untuk semua Pemohon perkara Saudara sudah kita pelajari, bahkan kami sudah gelar perkara untuk 4 perkara ini sehingga pada kesempatan ini, Saudara diminta menyampaikan pokok-pokoknya saja. Karena secara keseluruhan, Panel Hakim sudah

membaca, sudah mencermati permohonan-permohonan Saudara, sehingga sekali lagi Saudara diberikan waktu maksimal 10 sampai 15 menit, ya, untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara. Silakan siapa yang menyampaikan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Baik, saya sendiri, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

59. KETUA: ASWANTO

Ndak usah itu, langsung ke pokok perkara saja.

60. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Oh, baik.

61. KETUA: ASWANTO

Sori, saya lupa tadi.

62. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Baik, kita langsung ke Pokok Permohonan. Bahwa terkait perkara ini bahwa perolehan suara Pemohon yang benar (...)

63. KETUA: ASWANTO

Sudah, sudah, saya lupa tadi. Jadi Permohonan yang dibacakan adalah Permohonan yang ... yang tanggal 31 Mei, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Ya.

65. KETUA: ASWANTO

Baik. Sama dengan perkara yang lain, yang dibaca adalah atau yang disampaikan adalah permohonan yang menurut Mahkamah, kita

terakhir menerima perbaikan tanggal 31, ya. Kalau tidak ada perbaikan, berarti permohonan awal gitu. Silakan!

66. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Baik.

67. KETUA: ASWANTO

Silakan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Pokok permohonan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut. Provinsi Papua, terkait dengan Dapil Papua 1, Kabupaten Jayapura, kita mendasarkan pada adanya rekomendasi Bawaslu Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.00.01/V/2019 yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 47 TPS yang tersebar di beberapa distrik dan kampung. Kemudian di Kota Jayapura juga seperti itu.

Bahwa Bawaslu ... apa ... bahwa dalam pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu di tingkat Provinsi Papua dan seterusnya, Bawaslu menemukan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DA1-PPWP, Model DA1-DPD dan seterusnya ... bah ... dan seterusnya sampai poin D. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomo ... rekomendasi yang tidak mengakui hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram, Kota Jayapura.

Kemudian di Dapil Papua 3, Kabupaten Intan Jaya. Sama kita mendasarkan pada adanya rekomendasi Bawaslu RI, Bawaslu terkait dengan pemilihan di Intan Jaya (...)

69. KETUA: ASWANTO

Sebentar ... sebentar.

70. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Ya.

71. KETUA: ASWANTO

Supaya tidak keliru. Bawaslu provinsi atau Bawaslu?

72. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Bawaslu provinsi.

73. KETUA: ASWANTO

Ya, kalau Bawaslu berarti pusat, gitu ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Ya.

75. KETUA: ASWANTO

Ini Bawaslu provinsi yang dimaksud, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Bawaslu provinsi.

77. KETUA: ASWANTO

Bukan Bawaslu kabupaten/kota, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Bukan.

79. KETUA: ASWANTO

Oh. Silakan!

80. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Oh, baik. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu Tingkat Provinsi Papua tanggal 15 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Bawaslu Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.00.01/V/2019 karena menemukan hal-hal sebagai ... sebagai berikut.

Satu. Bahwa telah terjadi keberatan saksi parpol, yang termuat di dalam Formulir DC-1 untuk semua jenis pemilih ... pemilihan umum, kecuali pemilihan DPRD kabupaten.

Kedua. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya, saksi parpol menolak hasil rekapitulasi untuk semua jenis pemilihan ... poin 2 sampai 8 dianggap dibacakan dan langsung ke poin 9. Berdasarkan poin-poin di atas, Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui hasil pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya pada rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua.

Kemudian, ke ... Kabupaten Paniai bahwa dalam pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat Provinsi Papua, tanggal 12 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Bawaslu Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.00.01/V/2019 karena telah menemukan hal-hal sebagai berikut.

81. KETUA: ASWANTO

Dianggap dibacakan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Ya, poin 1 sampai ... ya dianggap dibacakan. Kemudian, persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten, Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1. Tabel 1 dianggap dibacakan.

Kemudian bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Bahwa penambahan per ... perolehan suara bagi parpor ... parpol lain di atas adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh Termohon dan parpol-parpol lain tersebut.

Kedua. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Selatan tanggal 3 sampai 4 Mei 2019, PPD Yapen Selatan memerintahkan kepada seluruh PPS yang berada di Kecamatan Yapen Selatan untuk membacakan perolehan suara dengan merujuk kepada secarik kertas tabulasi suara buatan PPD Yapen Selatan. Bukan berdasarkan data C-1

DPRD kabupaten/kota hologram, dan C-1 Plano DPRD kabupaten/kota dari kotak suara.

Bahwa atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Yapen Selatan mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen nomor sekian, tanggal 4 Mei 2019, perihal rekomendasi rekap ... rekapitulasi suara ulang tingkat PPD Distrik Yapen Selatan.

Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPUD Kepulauan Yapen mengeluarkan surat nomor sekian-sekian, tertanggal 5 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 359 sekian-sekian, tanggal 4 Mei 2019, yang isinya memerintahkan PPD Yapen Selatan untuk rekapitulasi suara ulang.

Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, PPD Yapen Selatan tidak mampu memenuhi dan menyelesaikan rekomendasi rekapitulasi ulang tersebut, sehingga PPD Yapen Selatan dinonaktifkan dan diambil alih oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen. Bahwa pada saat rekapitulasi suara ulang ... ulang Distrik Yapen Selatan oleh KPUD kep ... Kepulauan Yapen ... KPUD Kepulauan Yapen ternyata tidak melakukan rekapitulasi sesuai Pasal 18 dan Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 serta mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kepulauan Yapen.

Bahwa KPUD Kepulauan Yapen hanya membacakan 132 C-1 DPRD kabupaten/kota hologram dari 132 TPS Distrik Yapen Selatan secara sepihak dan hanya mencocokkan 9 C-1 DPRD kabupaten/kota Hologram dari 9 TPS dengan 9 C-1 Plano DPRD kabupaten/kota. Padahal ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap 132 C-1 DPRD kabupaten/kota hologram tersebut, bukan hanya di 9 TPS. Adapun 9 TPS tersebut adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa pada saat pencocokkan tersebut, ditemukan fakta ketidaksesuaian antara 9 C-1 DPRD kabupaten/kota hologram dengan 9 C-1 Plano DPRD kabupaten/kota tersebut dimana Salinan 9 C-1 DPRD kabupaten/kota milik Pemohon berkesuaian dengan 9 C-1 Plano DPRD kabupaten/kota tersebut. Bahwa 123 C-1 DPRD kabupaten/kota hologram sisanya yang telah dibacakan dan tidak dicocokkan dengan C-1 Plano tidak berkesus ... berkesesuaian dengan 123 C-1 DPR ... C-1 DPRD Kabupaten/kota salinan milik Pemohon.

KPUD Kepulauan Yapen tidak memberikan salinan DAA-DPRD Distrik Yapen Selatan, belum diberikan. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 KPU Kepulauan Yapen baru mengeluarkan DB-1 DPRD diantar oleh salah satu staf kantor KPU ke sekretariat masing-masing parpol dengan tanda terima Berita Acara nomor sekian-sekian, tertanggal 29 Mei 2019. SK Kepulau ... KPU Kepulauan Yapen Nomor sekian-sekian, tertanggal 9 Mei 2019, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Peserta Pemilu, Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, serta lampiran sertifikas ... sertifikasi ke rekapitulasi perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen DB1-DPRD tersebut hanya ditandatangani oleh ketua KPU atas nama Saudara Moris C. Muabuai dan 1 komisioner atas nama Saudara Awal Rahmadi dan tidak ditandatangani oleh 3 orang komisioner KPU Kepulauan Yapen. Dan perolehan suara sah partai dan Caleg Dapil I, Distrik Yapen Selatan berdasarkan C1-KWK Pleno rekapitulasi suara ulang di Distrik Yapen Selatan berbeda dengan DB1-DPRD yang dikeluarkan oleh KPU.

Kemudian, Dapil Kepulauan Yapen II (...)

83. KETUA: ASWANTO

Ya, saya kembali ingatkan, supaya enggak usah dibacakan semua (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Baik.

85. KETUA: ASWANTO

Pokok-pokoknya saja, ini mengingat waktu.

86. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.

87. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dapil Kepulauan Yapen II, tabel 2, persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon dianggap sudah dibacakan, antara Partai Solidaritas Indonesia sebagai Pemohon dengan Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

Atas selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Satu, perolehan suara partai dan caleg di atas terdapat sua ... selisih suara yang sangat jauh berdasarkan salinan C-1 DPRD kabupaten/kota milik Pemohon dan DAA1-DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan 2, meliputi Distrik Anatorei, Angkaisera, dan Yawakuat ... kukat.

Berdasarkan Berita Acara Nomor sekian, perhitungan suara terjadi di peng ... terjadi pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia sebesar 9 suara. Penggelem ... sebaliknya, penggelembungan suara Partai Nasdem sebesar 600 suara, penggelembungan suara PPP

sebesar 253 suara. Hal ini membuat perangkingan PSI turun ke peringkat keenam.

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia, mempertimbangkan keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan ini, sehingga suara yang dihilangkan untuk PSI dapat dikembalikan dan penggelembungan suara untuk Nasdem dan PPP dikembalikan sesuai DAA-DPRD tingkat distrik yang telah di-pleno-kan di masing-masing distrik.

Mengenai Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen IV. Persandingan perolehan suara parpol menurut Termohon dianggap dibacakan, yaitu antara PSI dengan Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Atas persandingan tersebut yang menunjukkan selisih tersebut, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Satu, perolehan suara partai dan caleg di atas, terdapat selisih suara yang sangat jauh berdasarkan salinan DAA1-DPRD tingkat distrik di Daerah Pemilihan 4, meliputi Distrik Yapen Barat, Windesi, Wonawa, Kosiwo, P ... Pulau Yerui, Poom. Berdasarkan Berita Acara Nomor PL.01.8 dan seterusnya, tertanggal 29 Mei 2019 SK KPU Kepulauan Yapen Nomor 12/ dan seterusnya, tertanggal 9 Mei 2019. Dan ... di situ lampiran sertifikasi perhitungan suara berbeda, yaitu perbedaannya adalah PSI kehilangan 456 suara, Partai Nasdem digelembungkan sebanyak 1.089 suara, PPP digelembungkan se ... sebesar 358 suara.

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia, untuk mempertimbangkan keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan ini, sehingga suara yang dihilangkan untuk PSI dapat dikembalikan dan penggelembungan suara Nasdem dan PPP dikembalikan sesuai DAA-DPRD tingkat distrik yang telah di-pleno-kan di masing-masing distrik.

Kabupaten Puncak, Dapil Puncak I, per ... persandingan perolehan suara parpol menurut Termohon dan Pemohon.

1. Di Distrik Ilaga, dianggap sudah dibacakan antara PSI dengan Partai Persatuan Indonesia ... Distrik Gome.
2. Distrik Gome, antara PSI dengan Partai Persatuan Indonesia
3. Distrik Gome ... Distrik Gome Utara, antara PSI dengan PKS dan Partai Hati Nunari ... Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura.

Atas persandingan selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- a. Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Ilaga, sebanyak 203 suara karena dipindahkan ke Partai Persatuan Indonesia sebanyak 203 suara.
- b. Total perolehan suara Pemohon di Distrik Ilaga, seharusnya 509 suara.
- c. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gome sebanyak 920 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Persatuan Indonesia, sebesar 920 suara itu.

- d. Terjadinya pengurangan suara Pemohon di Distrik Gome sebanyak 802 suara dikarenakan pindah ke PKS 680 suara dan Partai Hati Nurani Rakyat sebesar 121 suara, sehingga totalnya memang adalah 802 suara.
- e. Akibat tindakan tersebut, perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon, yaitu PSI di Dapil Puncak III, sebanyak 6 ... 4 ... 4.699 suara berkurang menjadi 3.459 suara. Terhadap hasil ...
- f. Terhadap hasil pleno rekap perolehan suara pemilu tingkat provinsi Papua, tanggal 14 Mei 2019, yang bertempat di Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Bawaslu Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 099/ dan seterusnya, yang merekomendasikan tidak mengakui seluruh hasil perhitungan suara untuk Kabupaten Puncak.
- g. Pemohon dalam pertimbangan rekomendasi tersebut dinyatakan tidak menolak hasil rekomendasi Kabupaten Puncak, padahal Pemohon menolak dengan tegas perolehan suara yang merugikan Pemohon serta tindakan Termohon yang tidak membagikan DB-1, DAA-1, serta C-1 DPR-RI kabupaten/kota.
- h. Terhadap rekomendasi tersebut, Pemohon keberatan karena pada faktanya terjadi Pemilu pada tanggal 17 April 2019. Adapun ketika hendak melakukan konfirmasi kebenaran perolehan hasil suara Pemilu pada dapil tersebut, dengan mendengarkan saksi kepala suku dari distrik masing-masing dapat dilakukan hal demikian karena sistem yang digunakan di Kabupaten Puncak menggunakan sistem noken dimana kepala suku yang mewakili semua masyarakatnya menentukan calon yang di ... menentukan caleg yang dipilih.
Dapil Puncak 3 tabel 5, persandingan perolehan suara parpol menurut Termohon dan Pemohon.
 1. Distrik Pogoma, dianggap sudah dibacakan, yaitu antara PSI, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Distrik Magae ... Mageabume dianggap sudah dibacakan antara PSI, PKS, dan PKB atas selisih suara sebagaimana tabel tersebut, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.
 - a. Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Pogoma sebanyak 1.240 suara karena PKS ... karena dipindahkan ke PKS=1.000 suara, dipindahkan ke PKB=240 suara sehingga memang totalnya 1.240 suara.
 - b. Akibat tindakan tersebut, perolehan suara Pemohon di Dapil Puncak 3 yang seharusnya 46 ... 4.000 ... maaf, 4.699 berkurang menjadi 3.459 suara.
 - c. Terhadap hasil pleno rekap perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua, tanggal 14 Mei 2019 di Hotel Grand Abe, Bawaslu Papua mengeluarkan hasil rekomendasi Nomor

099/ dan seterusnya, yang merekomendasikan tidak mengakui seluruh hasil perhitungan suara untuk Kabupaten Puncak.

- d. Terhadap rekomendasi tersebut, Pemohon keberatan karena faktanya telah terjadi Pemilu pada tanggal 17 April 2019. Adapun ketika hendak melakukan konfirmasi kebenaran perolehan hasil suara Pemilu pada dapil tersebut, dapat dilakukan dengan mendengarkan saksi kepala suku dari distrik masing-masing karena sistem yang digunakan di Kabupaten Puncak menggunakan sistem noken dimana kepala suku yang mewakili semua masyarakatnya untuk menentukan caleg yang dipilih.
- e. Pemohon dalam pertimbangan rekomendasi tersebut dinyatakan tidak menolak hasil rekomendasi Kabupaten Puncak, padahal Pemohon menolak dengan tegas perolehan suara yang merugikan Pemohon serta tindakan Termohon yang tidak membagikan Salinan DB-1, DA-1, serta C-1 DPRD kabupaten/kota.

4.2.3 Kabupaten Membramo Tengah.

- 1) Dapil Membromo Tengah 1 persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon, yaitu antara PSI dengan Perindo sebagaimana tabel yang mana dianggap sudah dibacakan, di Distrik Megambilis. Atas selisih suara tersebut, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.
 1. Pada saat Pleno Distrik Megambilis, Berita Acara tidak di ... tidak ditemukan, kami ulangi, Pada saat Pleno Distrik Megambilis, Berita Acara tidak ditemukan dalam kotak C-1 C ... hingga C-6, dan C-1 Plano, sehingga rekap hanya dilaksanakan di papan tulis.
 2. Ada upaya penyelenggara untuk mendukung partai tertentu, yaitu ada oknum PPD memindahkan suara PSI atas nama Caleg Yorim Tago dan Yelier Lebuk. Yorim Tago harusnya mendapatkan 300 suara, seri ... sori, maaf, 1.300 suara dan ti ... maaf, kami ulangi, 301 suara, yaitu Nomor Urut 1, Yorim Tago (Caleg PSI) dan Yelier Lebuk, yaitu seharusnya 415 suara, berada pada Nomor Urut 3 di dalam daftar caleg PSI, sehingga total suara berjumlah harusnya 716 suara, dipindahkan kepada Caleg Partai Perindo atas nama Israel.

Kabupaten Keerom, Nomor 4. Satu, Dapil Kerom 1, tabel 7, persandingan perolehan suara parpol menurut Termohon dan Pemohon. Tabelnya dianggap sudah dibacakan. Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Telah terjadi pengurangan perolehan suara PSI di beberapa TPS di distrik Web, dari total 142 suara sesuai hasil Pleno di Distrik Web, menjadi 124 suara pada saat Pleno di tingkat kabupaten.
 2. Bahwa pengurangan suara tersebut terjadi di TPS Dubu, Umuaf, Embi, Semografi, dan Tatakra dengan rincian sebagai berikut, berada dalam daftar tabel yang kami sertakan dianggap sudah dianggap dibacakan.
 3. Terjadi penambahan suara ke Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2, bernama Engelbertus Amu, yang menjadi bertambah sejumlah 19 suara.
5. Kabupaten Tolikara.
- 1) Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara, tidak dilakukan pemilihan untuk DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Pemilihan hanya dilakukan untuk DPRD kabupaten dengan sistem noken.
 - 2) Sekalipun pemilihan hanya terjadi untuk tingkat kabupaten, yaitu DPRD Kabupaten, tidak dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, baik rekap perolehan suara DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR ... DPR RI, maupun DPD RI.
 - 3) Sekalipun tidak pernah dilakukan rekap di tingkat distrik, tetapi kabupaten ... kami ulangi, tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan Pleno tingkat kabupaten sehingga perolehan suara yang dibacakan PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi di tingkat distrik.
 - 4) Pada saat Pleno tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara, salah satu Caleg DPR provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sampel 3 kotak suara yang masih tersegel. DPR provinsi=1 kotak, DPD RI=1 kotak, dan DPR RI=1 kotak. Maaf ini perlu direnvoi DPR RI, yang ... yang menunjukkan bahwa tidak ada pemilihan di Distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Distrik Kanggime saja, tetapi hampir di semua distrik di Kabupaten Tolikara.
 - 5) Berdasarkan bukti rekaman video, terdapat keterangan Ketua KPU Tolikara bahwa semua formulir perhitungan dan rekap tingkat KPPS tidak diserahkan dalam kotak-kotak suara, melainkan dimasukkan dalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisi dokumen Berita Acara tersebut ke kabupaten lain dan rekap suara tingkat PPD dibuat di luar distrik masing-masing.

- 6) Bahwa sekalipun ada fakta sebagaimana di atas, KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten sehingga hal ini patut dipertanyakan.
- 7) Berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa seluruh Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 097/ dan seterusnya yang pada pokoknya memerintahkan KPU Tolikara melakukan penyandingan data, pembetulan, atau perbaikan data bila ditemukan, dan memerintahkan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses tersebut. (Bukti P-38)

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon Nomor 9 ga ... 9 ... kami ulangi, Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (...)

88. KETUA: ASWANTO

Enggak usah di ... enggak dibacakan itu. Sudah tahu kita (...)

89. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Baik.

- secara nasional dalam Pemilu 2019, tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Provinsi Papua Dapil 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi, Dapil Papua 3, dapil ... eh untuk seterusnya, Dapil Kepulauan Yapen 1, Dapil Kepulauan Yapen 4, Dapil Kepulauan Yapen 2, Dapil Kepulauan Puncak 1, Dapil Kepulauan Puncak 3, untuk keanggotaan dap ... DPRD kabupaten masing-masing yang barusan disebutkan. Dapil Mamberamo Tengah 1 untuk pengisian DPRD kabupaten juga, Dapil Kerom 1 ... Kerom 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, dan semua dapil di Kabupaten Tolikara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah

pemilihan sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1, PSI=1.186 suara. Kabupaten Kepulauan Yapen 4, PSI=1.766 suara. Kabupaten Kepulauan Yapen 2, PSI=1.519 suara. Kabupaten Puncak, Dapil Puncak 1, PSI=4.404 suara. Dapil Puncak 3, PSI=4.699 suara. Kabupaten Mamberamo Tengah, Dapil Mamboramot ... Mamberamo Tengah 1, PSI=716 suara. Kabupaten Kerom, Dapil Kerom 1, PSI=732 suara.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan PSU, pemiligan ... PSU di Provinsi Papua, Dapil 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi, Dapil Papua 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi, semua Dapil Kabupaten Tolikara untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aquo et bono.

Hormat kami, Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon. Kami yang hadir saat ini adalah Nasrullah dan Heriyanto. Tertanda ada Surya Tjandra, Kamaruddin, Viany Limardi, Dini S. Pur ... Purwono, Rian Ernest Tanujaya.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan ini. Kami ingin menyampaikan sedikit renvoi pada halaman pertama Permohonan, Yang Mulia, yaitu tanggal surat kuasa, ada kesalahan di situ. Pada ... kan dikatakan tanggal Permohonan awalnya ketika masuk sebelum perbaikan itu kan 23 Mei, sedangkan surat kuasa di paling bawah halaman 1 itu kami tulis, kuasa itu 24 Mei, padahal kuasanya ya tanggal 23 juga. Itu kami menyampaikan renvoi, mohon maaf.

Kedua, seharusnya Puncak 1 dan Puncak 3 itu kan Kabupaten Puncak 1, Kabupaten Puncak 3. Di halaman 1 Permohonan, Nomor 6 dan Nomor 7, setelah menyebut ketua umum dan menyebut sekjen di bawahnya 1 sampai 10, Nomor 6 dan Nomor 7 kami sebut Kepulauan Puncak 1, Kepulauan Puncak 3, mohon maaf, mohon agar direnvoi menjadi Kabupaten Puncak 1, Kabupaten Puncak 3.

90. KETUA: ASWANTO

Ya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan ini. Oh ya, di petitum juga ... maaf, sama. Di petitum kan tetap disebut Kepulauan Puncak 1 dan Kepulauan Puncak 3, mestinya ya Kabupaten Puncak 1 dan Kabupaten Puncak 3 juga di petitum. Di ... di bagian petitum akhir.

92. KETUA: ASWANTO

Baik.

93. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Demikian, Yang Mulia.

94. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

95. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

96. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 200 (...)

97. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAMSUDIN SLAWAT

Mulia ... Yang Mulia, mohon ... dari Termohon. Koreksi saja tentang kehadiran tadi, Yang Mulia, pas absensi tadi bahwa rekan kami mengatakan dari Perkara 203/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sesungguhnya Perkara 250/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

98. KETUA: ASWANTO

Oke. Perkara 250/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

99. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAMSUDIN SLAWAT

Ya.

100. KETUA: ASWANTO

Oh, berarti Prinsipal ... Prinsipal untuk Pemohon, Ketua Umum Wilayah Adat itu juga hadir, ya?

101. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAMSUDIN SLAWAT

Ya.

102. KETUA: ASWANTO

Ya. Makanya tadi saya sudah ingatkan, ini kan KPU provinsi juga Prinsipalnya. Ya, baik, untuk Perkara 250/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tadi pukul 13.15 WIB, juru panggil Mahkamah telah melakukan konfirmasi melalui Kuasa Hukum Pemohon dan didapat ... informasi yang kita peroleh bahwa baik Pemohon maupun kuasa hukumnya itu masih berada di Papua, ya. Ini ... eh ... untuk Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang Prinsipalnya juga Prinsipal Termohon hadir, ya? atau Kuasa Termohon hadir. Berarti kita langsung ke Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Partai Amanat Nasional. Silakan, Saudara punya waktu 10 sampai 15 menit.

103. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Mohon koreksi, Yang Mulia. Partai Persatuan Pembangunan. Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

104. KETUA: ASWANTO

Oh ya. Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Sori. Saya yang salah.

105. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Ya.

106. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PPP?

107. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Ya.

108. KETUA: ASWANTO

Ya, yang di bawah baru PAN, 116, silakan!

109. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

110. KETUA: ASWANTO

Wallaikumsalam.

111. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Permohonan dari PPP ini yang kami bacakan permohonan awal 23 Mei 2019. Ada pun dapil yang kami bacakan adalah Dapil Papua 1, Dapil Papua 2, Dapil Kabupaten Tolikara. Langsung masuk ke pokok perkara.

Persandingan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian anggota DPR, Provinsi Papua, Dapil Papua 1. Persandingan perolehan suara menurut Pemohon PPP, Partai Berkarya dianggap dibacakan. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terlihat jelas adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Berkarya.

Tidak ada lagi, cukup. Langsung ke Dapil Papua 2.

112. KETUA: ASWANTO

Oke.

113. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Persandingan perolehan partai politik menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian kabupaten DPR Provinsi ... Papua 2, Partai Persatuan Pembangunan dianggap dibacakan, Partai Hanura dianggap dibacakan, Partai Demokrat dianggap dibacakan. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara tersebut, ada suara Pemohon memperoleh suara penambahan Partai Hanura dan Demokrat persandingan tidak mengurangi perolehan suara di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Selatan.

Maka, di Distrik Kabupaten Yapen Selatan, PPP seharusnya memperoleh=14.919, Hanura=15.249, Demokrat seharusnya 40.784. Langsung kami ke apa ... Distrik Kecamatan Naturei dianggap dibacakan tabel-tabelnya. Partai Hanura, halaman 7, penambahan suara Partai Hanura sebanyak 1.402 suara dengan rincian penambahan suara Partai Hanura sebanyak 1.402 suara dari DA1 ke Db suara Partai Hanura DA1 Distrik Kecamatan Atau ... Anotare sebanyak 859 suara sedangkan di Db Kabupaten Yapen sebanyak 2.261 suara jadi ada penambahan 1.402 suara.

Penambahan suara terjadi pada suara Caleg Nomor 3 Fadly, dianggap dibacakan. Penambahan suara dianggap dibacakan, Partai Demokrat. Penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 1.300 suara dari 1.194 suara menjadi 3.025 suara dengan rincian sebagai berikut yang dianggap dibacakan.

Distrik Kemaca ... Distrik eh ... Kecamatan Kepulauan Ambai, Pemohon PPP mempersandingkan selisih perolehan suara dengan alat Bukti D1 ... DA1 Distrik Kecamatan Ambai ke Db-1 (ucapan tidak terdengar jelas). Persandingan dianggap dibacakan. Partai Persatuan Pembangunan pengurangan suara Pemohon sebanyak 125 suara menjadi 0 suara. Pengurangan di setiap distrik dianggap dibacakan. Partai Hanura penambahan suara partai sebanyak 834 suara dari 64 ... 66 suara menjadi 900 suara, pengurangan poin 1 dan 4 dianggap dibacakan. Partai Demokrat penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 229 suara, dari 1.608 suara menjadi 1.837 suara, poin 1 dan 5 dianggap dibacakan.

Tiga, Distrik Kecamatan Angkaisera. Pemohon PPP menyandingkan perolehan suara, dianggap dibacakan. Partai Persatuan Pembangunan, penambahan suara Pemohon sebanyak 63 suara dari (ucapan tidak terdengar jelas) menjadi 1.077 suara. Partai Hanura, penambahan suara Partai Hanura sebanyak 824 suara, dari 359 suara menjadi 1.183 suara, dianggap dibacakan. Partai Demokrat, penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 463 suara, dari 2.095 suara menjadi 2.558 suara, penambahan dianggap dibacakan kepada calegnya.

114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar ... sebentar. Itu yang dalam tanda kurungnya harusnya selisihnya bukan minus, ya? Tambah berarti, ya?

115. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Ya, ya, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu beda itu.

117. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Ya, ya, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau suaranya kurang dikasih tanda minus, tapi ini suaranya berlebih-lebih semua, ya?

119. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi tiga-tiganya tandanya plus?

121. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Ya.

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Anda renvoi, ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Ya, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

125. KETUA: ASWANTO

Silakan dilanjutkan!

126. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SYAMSUL BAHRI

Distrik Kecamatan Kosiwo. Pemohon PPP menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara dari DA-1 distrik, persandingan dianggap dibacakan. Penambahan suara partai dana ... han ... han ... Hanura sebanyak 372 suara, dari 166 suara menjadi 538 suara penam ... penambahan suara ditam ... selanjutnya dianggap dibacakan. Distrik, Kecamatan Ampimoi. Pemohon menyandingkan selisih perolehan suara serta alat bukti C-1 ke DB-1 kecamatan ... Kabupaten Kepulauan Yapen dianggap dibacakan. Selanjutnya ...

127. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan selanjutnya!

128. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya persandingan suara politik menurut Termohon dan Pemohon. Partai Persatuan Pembangunan selisih suara 114, Partai Demokrat=1.000 ... 1.072 (...)

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu, ini perlu juga. Ini agar ... agar lebih klir ya. Itu di PPP ya, di ... di halaman 10 itu, C-1 Anda perolehannya awalnya 114?

130. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

114, Yang Mulia.

131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kemudian di DB-1 menjadi 0?

132. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Menjadi 0.

133. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti Anda kan kehilangan (...)

134. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

114 suara.

135. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tandanya harusnya negative, gitu.

136. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Ya.

137. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu ada C-1 Demokrat=927 menjadi 2.001. Tandanya itu positif atau negatif?

138. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Positif, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah ini, tanda positif negatif ini balik-balik kelas 1 SD lagi kita ini susah ini kalau kayak begini.

140. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Mohon maaf, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Silakan!

142. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Langsung, ya? Langsung ke halaman 12, Yang Mulia. Distrik Kecamatan Yapen Barat, persandingan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dalam C-1=287 dan ke DB-1 berubah menjadi 6, jadi minus 281. Dan Partai Hanura=314 dalam C-1, dalam DB-1 berubah menjadi 1.297, minus 983. Dan Demokrat dalam C-1=2.117 dan dalam DB-1=6.472.

143. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini plus atau minus?

144. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Plus, Yang Mulia. Plus 4.000 ... 4.355.

145. KETUA: ASWANTO

Ini tandanya berubah-ubah mulu.

146. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Lanjut, poin 8 Distrik Kecamatan Yapen Selatan. Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Papua Nomor 103, tertanggal 15 Mei 2019, pada angka poin 11 poin c yang menyatakan bahwa terdapat rekapitulasi (...)

147. KETUA: ASWANTO

Sebentar sebentar, ini tandanya masih keliru tadi. Di PPP itu 287 di ... apa namanya ... C-1 kemudian di DB=61?

148. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Betul, Yang Mulia.

149. KETUA: ASWANTO

Anda memberi plus 281, mestinya kan minus?

150. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Betul, Yang Mulia. Kesalahan, Yang Mulia. Mohon maaf.

151. KETUA: ASWANTO

Kemudian Hanura itu plus, ya (...)

152. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Ya.

153. KETUA: ASWANTO

983.

154. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Betul, Yang Mulia.

155. KETUA: ASWANTO

Oke.

156. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Oke, poin 8. Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Papua Nomor 103 pada ... tertanggal 15 Mei 2019, pada angka 11 poin c yang menyatakan bahwa terhadap rekapin ... rekapitulasi hasil perhitungan suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Papua sehingga menurut Pemohon perlu dilakukan pemungutan suara ulang karena terjadi penambahan dan pengurangan

suara partai yang tidak sesuai dengan rekapitulasi di tingkat TPS. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

157. KETUA: ASWANTO

Ya.

158. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Langsung ke halaman 16, Yang Mulia. Dapil Kabupaten Tolikara, pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara tidak dilakukan pemilihan umum untuk calon anggota DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Namun yang dilaksanakan hanya pemilihan umum untuk calon anggota DPRD kabupaten dengan sistem noken. Poin 2, pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, tetapi tidak pernah dilaksanakan pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik atau kecamatan untuk calon anggota DPRD kabupaten, calon anggota DPRD provinsi, DPRD RI, dan calon anggota DPD RI. Namun KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten Tolikara sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif karena fakta tidak pernah dilaksanakan pleno rekapitulasi di tingkat distrik atau kecamatan dan pemilihan umum untuk calon anggota DPRD kabupaten, calon anggota DPRD provinsi, DPR RI, dan calon anggota DPD RI.

Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara, salah satu DPR provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sample 3 kotak suara yang masih tersegel dalam provinsi DPR RI dan DPD RI yang menunjukkan bahwa tidak adanya pemilihan di Distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Distrik Kanggime, akan tetapi juga terjadi di hampir semua distrik di Kabupaten Tolikara.

Empat. Bahwa berdasarkan rekaman video ketua KPU Tolikara menerangkan bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS tidak disertakan dalam kotak suara, melainkan dimasukkan di dalam kotak khusus. Hal ini yang memicu PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen Berita Acara tersebut ke kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat di luar distrik masing-masing.

Menyimak ... tin ... tindakan KPU Kabupaten Tolikara tersebut, pada angka 4 di atas adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua dengan bukti penerimaan laporan Nomor 129, tertanggal 22 Mei 2019.

159. KETUA: ASWANTO

Sebentar, ini mau mengklarifikasi.

160. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Ya, Yang Mulia.

161. KETUA: ASWANTO

Di nomor 4, hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen Berita Acara tersebut ke kabupaten lain?

162. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Ya, Yang Mulia.

163. KETUA: ASWANTO

Ada ndak kabupaten mana yang disebut? Inikan kita disuruh menghayal kalau ini. Ini ... ini jadi fiksi kita.

164. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Ada di dalam bukti, Yang Mulia.

165. KETUA: ASWANTO

Di dalam bukti disebutkan (...)

166. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Ada, Yang Mulia.

167. KETUA: ASWANTO

kabupaten-kabupaten yang (...)

168. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Ada, Bukti P-28 sampai P-29.

169. KETUA: ASWANTO

Oke, baik. Jadi, P-28, P-29 itu bukti PPD-PPD yang membawa lari kotak suara?

170. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA

Betul, Yang Mulia.

171. KETUA: ASWANTO

Oke, silakan!

172. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan ... dianggap dibacakan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pengisian anggota DPRD provinsi di beberapa daerah pemilihan Papua 1, Papua 2, dan Kabupaten Tolikara sebagai berikut.
Dapil 1, Papua ... Dapil Papua 1, dengan suara Termohon=19.355 dan menurut Pemohon=2.286, sehingga selisih suara sekitar=2.931. Partai Berkarya=19.774 menurut Termohon dan menurut Pemohon=19.335, sehingga terjadi selisih 419.
Selanjutnya, Dapil 2 ... Dapil Papua 2, perolehan suara dalam tabel. Partai Persatuan Pembangunan menurut Termohon=14.577 dan menurut Pemohon=16.124. Hanura=35.000 ... 35.051 menurut Termohon, menurut Pemohon=16.796. Demokrat menurut Termohon=58.452 dan menurut Pemohon=46.223.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan tersebut ... memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan atau mematuhi putusan tersebut (...)

Ini ... oke, poin 2 memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang distrik atau kecamatan Yapen Selatan.

4. Dapil Kabupaten Tolikara.

1. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ... untuk pengisian calon anggota DPRD provinsi di Kabupaten Tolikara.
 2. Memerintakan kepada Termohon untuk melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik se-Kabupaten Tolikara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa ... Kuasa Hukum Pemohon yang dihadiri oleh saya, atas nama Tantri Maulana dan rekan sebelah kanan saya Andi Syamsul Bahri, serta sebelah kanan berikutnya, Muslimin Mahmud. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

173. KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya untuk Perkara Nomor 116 Partai Amanat Nasional. Waktu Anda juga 10 sampai 15 menit, silakan!

174. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami (...)

175. KETUA: ASWANTO

Ya, PAN, ya?

176. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Dapil Papua III, kami langsung masuk pada pokok permohonan.

177. KETUA: ASWANTO

Ya.

178. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Dapil Papua 3, nama Aner Maisini, S.H., M.H., perolehan suara menurut Termohon=7.470, menurut Pemohon=39.959 terdapat selisih=32 ... 32.489 suara. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon Aner Maisini di rekapitulasi Termohon tingkat Kabupaten Intan Jaya dan Tingkat Provinsi Papua oleh Termohon sebanyak=32.489 suara, dikarenakan hal sebagai berikut.

Untuk poin A. Bahwa Pemohon Aner Maisini mendapat suara di 8 distrik atau 8 desa kelurahan dengan jumlah TPS 39 berdasarkan sistem noken yang diatur dalam keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 810/PL.02.6-kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Untuk 8 desa atau kelurahan kampung dapat kami uraikan sebagai berikut. Di Distrik Sugapa, khusus untuk Emon ... kam ... di Desa Emondi, Yopari, Puyagiya, Jalai, dan seterusnya, Pemohon mendapat suara sebesar 10.810 ... 10.807 suara sebagaimana terdapat dalam tabel di halaman 5.

Poin berikut. Distrik Hitadipa. Pemohon juga memperoleh suara di Kelurahan Balamai, Sanaba, Pugisiga, Hitadipa, Songgama, Danggomba, Sa ... Sakumba, sebesar 6.666 suara. Bahwa rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya, hasil pemungutan suara Pemohon berdasarkan bukti DB-1 DPRP, pada Kecamatan Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3, suara Pemohon tinggal 4 atau tersisa 4.724 suara. (Bukti P-32).

Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Partai Gerindra, Dapil Papua 3, Nomor Urut 7 dan di pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan bukti DB-1 se ... sebanyak 7.257 suara. Di mana pada hasil rekapitulasi di tingkat TPS, yaitu pada sertifikat hasil penghitungan suara Caleg Anggota DPR Perwakilan Rakyat Papua, pemilihan umum tahun 2019 pada Distrik Hitadipa terdapat 7 kampung yang mana pada tanggal 17 April 2019, suara pada TPS di 7 desa atau kelurahan di Distrik Hitadipa diberikan dengan sistem noken kepada Pemohon sebanyak 6.666 suara.

Distrik Hitadipa, tabelnya mohon dianggap dibacakan pada halaman 8. Bahwa pada rekapitulasi oleh Termohon KPU Kabupaten Intan Jaya, pada tingkat Kabupaten Intan Jaya, suara Pemohon, Aner Maisini dari 39 ... 39.005 ... 39.959 suara, berdasarkan Bukti C-1 DPRP pada Kecamatan atau Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, Distrik Agisiga, berkurang menjadi 22.210.

Kemudian, pada hari kepres ... kemudian pada hari rekapitulasi oleh Termohon di tingkat Provinsi Papua, seorang Pemohon, Aner Maisini, berkurang lagi menjadi 7.000 (...)

179. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar Pak, ya. Coba lihat di halaman 8! Kan sedang di halaman 8 atau 9 sekarang itu? 8 ya, ada tabel itu. Itu yang perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti C-1 DPRP tingkat desa atau kelurahan itu memang kosong, ya? Oh, ini kopinya (...)

180. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Kopinya, Pak (...)

181. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan! Di sininya ada (...)

182. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Mohon maaf, yang aslinya ada, Majelis (...)

183. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya ... ya ... ya (...)

184. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Saya lihat yang kopiannya (...)

185. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

186. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Mungkin, kopinya (...)

187. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya ... ya, silakan dilanjutkan.

188. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Oke baik, terima kasih Majelis atas perbaikan. Bahwa pada rekapitulasi oleh Termohon, KPU Kabupaten Intan Jaya, pada tingkat Kabupaten Intan Jaya, suara Pemohon dari 39.959 suara berdasarkan bukti C-1 DPRD pada Kecamatan Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan Distrik Agisiga berkurang menjadi 22.210. Kemudian pada rekapitulasi oleh Termohon di tingkat Provinsi Papua, suara Pemohon Aner Maisini, berkurang lagi menjadi 7.470.

Berdasarkan bukti C-1 DPRD dan bukti DA-1 DPR Pro ... Pemohon memperoleh suara sebanyak 39.959 suara, jumlah total suara Pemohon menurut Pemohon. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon di mana Termohon menghilangkan suara Pemohon atas nama Aner Maisini, S.H., kepada Partai Demokrat Nomor Urut 2 dari Daerah Pemilihan Papua 3, pada Kecamatan Distrik Sugapa dan Partai Gerindra Dapil Papua 3, Nomor Urut 7, dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada Distrik Hitadipa dan Distrik Asi ... Agisiga pada rekapitulasi PPD Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan Distrik As ... Asigi ... Agisiga, dan rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya, Daerah Pemilihan Papua 3, serta rekapitulasi tingkat Provinsi Papua.

Berikut Dapil Papua VI, atas nama Imanuel Kogoya, perolehan suara menurut Termohon=14.007 ... 14.740, menurut Pemohon=44.850, selisih 30.110 suara. Bahwa suara Pemohon (...)

189. KETUA: ASWANTO

Itu di ... dianggap dibacakan (...)

190. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, dianggap dibacakan.

191. KETUA: ASWANTO

Dapil 6, Calvin Haluk.

192. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Dapil 6, Calvin Haluk.

193. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Dapil 6, Calvin Haluk, renvoi dulu, dilakukan renvoi. Halaman 23 tentang tabel perolehan suara, Calvin Haluk, perolehan suara, Termohon=9.274. Pemohon yang tadinya 13.468, renvoi menjadi 15.542 ... selisihnya tadinya 4.194, menjadi 6.000 ... 6.268.

194. KETUA: ASWANTO

Diulangi tadi, Termohon=927 jadi? 974 jadi berapa?

195. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Tetap 9.274, tetap.

196. KETUA: ASWANTO

Pemohon?

197. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Pemohon=13.468 menjadi 15.542, selisih ... tadinya 4.194 menjadi 6.268. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Poin satu. Renvoi pada ali ... baris kedua dari bawah 13.468 menjadi 15.542. Selanjutnya poin 2 (...)

198. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini perhitungan baru, ya? Ya? Oh, jadi ini ... apa namanya ... mengubah, ya? Kan ... nanti akan kami pertimbangkan karena kan tidak boleh mengubah substansi, kecuali mengubah apapun ... mengubah hal-hal redaksional segala macam. Kalau angka dalam pemilu itu kan substansi, tapi itu akan kami pertimbangkan nanti, yang penting fakta itu Anda sampaikan dulu, ya? Silakan!

199. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya. Poin 2 dianggap dibacakan, 3, 4, 5 dianggap bacakan. Distrik Wamena Kota, tabel dianggap dibacakan, lanjut. B, Distrik Walelagama, tabel dianggap dibacakan. Lanjut, C, Distrik Libarek

dianggap dibacakan. D, Distrik Napua, selanjutnya dianggap dibacakan. E, Distrik Walaik, dianggap dibacakan. Distrik Wadanku, dianggap dibacakan. G, Distrik Wouma, dianggap dibacakan, distrik ... H, Distrik Siepkosi, itu sama renvoinya, DA ... DA-1=3.968 dan suara hilang sama=3.968. Selanjutnya I, Distrik Piramid, dianggap dibacakan. J, Distrik Bolakme, dianggap dibacakan. K, Distrik Maima, dianggap dibacakan.

200. KETUA: ASWANTO

Langsung ke ini saja, ke ... itu yang distrik-distrik dianggap dibacakan, sama saja.

201. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya. Poin 6.

202. KETUA: ASWANTO

Langsung ke Dapil 6 atas nama Ana Irianti.

203. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya. Dapil Papua 6, Ana Irianti Medlama. Amd.Ak., perolehan suara Termohon=3.730, Pemohon=22.852 selisih=19.122

Poin 1 sampai 5 dianggap dibacakan. distrik ... A, Distrik Wamena Kota dianggap dibacakan. J, Distrik Kurulu, dianggap dibacakan. Distrik Yalengga, dianggap dibacakan. D, Distrik Wesaput, dianggap dibacakan. E, Distrik Wouma, dianggap dibacakan. F, Distrik Hubikiak, dianggap dibacakan. G, Distrik Libarek, dianggap dibacakan. H, Distrik Pisugi, dianggap dibacakan. Distrik Koragi, dianggap dibacakan. I ...maaf, J, Distrik Bipiri dianggap dibacakan.

Poin 6, bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif berupa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan menghilangkan suara Pemohon atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak., di 10 distrik se-Kabupaten Jayawijaya, baik pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS, di tingkat distrik, maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Hal ini terbukti dari pernyataan beberapa saksi Partai PAN, baik pada saat pleno tingkat distrik maupun pada saat pleno di tingkat Kabupaten Jayawijaya di Wamena yang diperkuat oleh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01/V/2019 (Bukti P-66), tanggal 9 Mei 2019.

Daerah pemilihan Papua 2. Tabel (...)

204. KETUA: ASWANTO

Kembali lagi ke atas ya? Papua 2, Oke? Prov ... Provinsi, ya?

205. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya, Provinsi.

206. KETUA: ASWANTO

Dapil Papua 2?

207. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Dapil Papua 2.

208. KETUA: ASWANTO

Oke. Silakan!

209. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Tabel 1, tabel dianggap dibacakan, itu renvoi (...)

210. KETUA: ASWANTO

Ya.

211. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Tentang selisih, itu ... PKB itu selisihnya itu 0, Pak, bukan plus. Itu ada kode plus dan PDIP itu 0, bukan plus. PSI itu juga 0, bukan plus. PAN itu plus 10.666 itu (...)

212. KETUA: ASWANTO

Ya.

213. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Jadi bukan min. Bahwa mengenai (...)

214. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar ... sebentar, Pak. Itu halaman 39, ya?

215. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

38.

216. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. 39 nya itu kan (...)

217. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Sama.

218. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sama, ya?

219. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Sama, ya. Itu (...)

220. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi ini masih ada kosong-kosong selisihnya ini. Apa maksudnya ini?

221. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Itu sama sebenarnya, 0, Pak. Tidak ada. Tidak ada selisih, Pak.

222. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kan ada Partai PKB (...)

223. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya.

224. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Model DC-1=11.883. Form Model C-1=6.783, lalu selisihnya ini?

225. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Itu sama kosong, Pak. Tidak ada selisih.

226. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ada selisih?

227. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya.

228. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, orang angkanya beda bagaimana tidak ada selisihnya itu, Pak? Ya, kan? Atau ini memang tidak diisi, begitu?

229. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Tidak diisi, Pak. Memang tidak diisi. Sama dengan di atas, Pak.

230. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, coba lihat 12, yang PAN itu. Ya?

231. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya.

232. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya bacakan PAN, itu partainya PAN, di Model C-1 nya=11.051.

233. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya.

234. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Model DC-1, ya? Di Model C-1 nya, Form Model C-1=21.719. Lalu, di sini ada minus 10.666, ya?

235. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya.

236. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kenapa yang satu ini saja yang diisi, yang lain tidak diisi? Apa maksudnya ini?

237. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Karena terjadi ... hanya ... hanya khusus PAN yang terjadi kehilangan suaranya sekian 10.000, Pak.

238. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang di atas ini tidak ada hilang hak suaranya? Coba lihat betul!

239. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Kami tidak tahu (...)

240. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kuasa hukum, ya?

241. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya.

242. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini misalnya, Anda hanya isi PAN saja, minus 10.666, padahal di sini ada perbedaan suara juga. Yang di sini sengaja tidak diisi karena tidak klien Anda atau bagaimana?

243. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Seingatnya tidak diisi dan kami karena tidak tahu, Pak.

244. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, karena tidak tahu?

245. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya, tidak dapat dokumennya (...)

246. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi Anda cuma tahu yang satu ini saja, ya?

247. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya, betul.

248. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ah, kan perlu kejelasan ini. Kalau kita ini belajar matematik juga ini. Ini kalau ada hasilnya di sini, masa di sini tidak ada, begitu.

249. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya.

250. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, karena kuasanya tidak ada, tidak pentinglah, ya.

251. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya.

252. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu jelas itu. Jadi, apa namanya ... tambah, kali, kurangnya menjadi lebih jelas, begitu. Terima kasih, Pak Ketua.

253. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya, renvoinya sama dengan halaman 40 dan ... ya, 40. Yang ada tanda plusnya itu jadi 0 semua, Pak. Terus yang 10.000, PAN min menjadi plus. Ya, masih halaman 39.

Poin 1, dianggap dibacakan. A, b, dan c, tabel dianggap dibacakan. Yang berikut, Pemohon tidak pernah mendapat Model C-1 dari proses rekapitulasi sejak hari H sampai dengan proses rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten dan sampai pada tingkat provinsi, rekap tingkat provinsi baru Pemohon mendapat Model C dengan segala upaya. Model C sat ... Model C-1.

Bahwa terjadi pengurangan suara PAN sehingga perolehan suara PAN tidak sesuai dengan rekapitulasi tingkat PPD Distrik Biak Kota dan PPD Distrik Samofa, Format Model DAA-1, rekapitulasi tingkat Kabupaten Biak Numfor, Format Model DB-1 dan saksi PAN dalam pleno kabupaten/provinsi melakukan beberapa keberatan terhadap rekapitulasi pada KPU Biak Numfor, KPU Yapen, dan KPU Waropen. Demikian. Dilanjutkan oleh rekan saya.

254. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SERGIUS WEBISER

Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, Kabupaten Puncak Jaya, Dapil 4, persandingan perolehan suara untuk termo ... Pemohon dan Termohon ... yang dari Kabupaten Puncak Jaya. Pertama, Bekies Kogoya yang menurut Termohon=370, menurut Pemohon=550. Kemudian kedua, Eli Kogoya=2.400, menurut Pemohon=4.229.

Poin pertama. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, Bekies Kogoya bahwa di renvoi di bagian 1 itu saya tulis 2.249, yang benar adalah 2.430. Oke, saya lanjut. Bapak mohon Bekias ... Bekies Kogoya mendapatkan suara di Distrik Ilu sebanyak 5.500, namun kemudian pada rekapitulasi tingkat kabupaten, suara Pemohon tinggal 3.070. Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada caleg dari Partai Parpol Kebangkitan Bangsa, Dapil 4, Nomor Urut 1 sebanyak

2.430 suara, padahal pada saat pleno tingkat Distrik Ilu suaranya yang diperoleh di DA1 adalah 0 suara.

Kedua. Bahwa terjadi pengurangan perolehan pengum ... Pemohon, Eli Kogoya itu 1.829. Kemudian, Eli Kogoya, pada rekapitulasi tingkat Distrik Ilu memperoleh suara 4.299, tetapi ketika rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya, suaranya menjadi 2.400. Termohon mengalihkan suara Pemohon, Eli Kogoya kepada caleg dari Partai Nasdem, Dapil IV, Nomor Urut 1 berdasarkan Bukti DB-1.

Kemudian bahwa terjadi penge ... ada surat Bawaslu nomor ... dianggap dibacakan kepada Termohon. Namun kemudian, Termohon tidak menjalankannya. Saya lanjut Kabupaten Jayawijaya, Dapil Jayawijaya 2. Nama calon John Kolago perolehan suara yang diperoleh oleh Termohon menurut Termohon=864, menurut Pemohon=4.340. Bahwa pada Distrik Alo ... Asologaima, Pemohon memperoleh suara sebanyak eh ... 4.340. Namun kemudian dari Pemohon tidak tahu suaranya dialihkan di mana, di partai mana.

Kami lanjut ke Kabupaten Jayawijaya, Dapil Jayawijaya 4. Dalam tabel Semi Hisage perolehan suara menurut Termohon=2.282, menurut Pemohon=4.036. Pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.754. Bahwa pada saat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, suara Pemohon berdasarkan Model Db-1 DPRD suara Pemohon Semi Hisage berkurang dari Distrik Siepkosi menjadi 214. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Dapil Jayawijaya 4 Nomor Urut 9 Linai Oagay, S.sos.

Baik, dilanjutkan oleh rekan saya.

255. KETUA: ASWANTO

Silakan! Kabupaten Paniai Dapil 1.

256. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, Kabupaten Paniai Dapil 1. Persandingan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Paniai untuk pengisian anggota DPR Kabupaten Kota. Nama calon anggota DPRD, satu, Anton Gobay dan seterusnya.

Anton Gobay, Pemohon 3 ... memperoleh suara 3.986, Pina Kayame= 3.579, Naftali Gobay=3.669, Hendrikus Mote=4.082, Serfius Adii=550.

Dapil 2. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Piniai, 1. Esebius Gobay=11.389, Moses Pigay=1.601, Hendrika Gobay=2.035, Octopianus Pigome=2.711, Ismael Pakopa=1.308.

Perolehan suara caleg DPR Kabupaten Paniai berdasarkan C-1 Dapil 1 seperti terlampir dalam tabel halaman 48 ... 48. Perolehan suara caleg DPR Kabupaten Paniai berdasarkan C-1 Dapil 2 seperti terlampir dalam tabel halaman 49, 50, dan tabel 51. Ada pun suara yang diperoleh para Pemohon dari Dapil 1 berasal dari distrik/kecamatan sebagai berikut. Paniai Timur, Pugo Dagi, Wegee Bino dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

Kabupaten Asmat persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPR kabupaten kota.

257. KETUA: ASWANTO

Asmat 1 ditarik, ya?

258. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

259. KETUA: ASWANTO

Baik. Asmat 2 sekarang.

260. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, Majelis Hakim untuk yang Asmat 1 Kuasa Hukumnya ada di ...
Oh ya, saya langsung ke Asmat 2, Majelis.

261. KETUA: ASWANTO

Asmat 2 saja dulu, nanti Asmat 1.

262. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, Asmat 2, Partai PAN. Termohon memperoleh suara=1.110. Termohon ... Pemohon mendapat perolehan suara=1.406, selisih 296. Bahwa Dapil Asmat 2 pada Distrik Ayip terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 296 suara dikarenakan berdasarkan hasil penghitungan suara TPS 02 Desa Comoro, Desa Sagare, Desa Yefuwagi, Desa Yefuwagi, Desa Wagi, Desa Kawet, Desa Maugi. Mohon dianggap dibacakan untuk halaman 53 dan 54.

Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas pada Dapil Asmat 2, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di Distrik Ayip di Kabupaten Asmat sebagai berikut. Dapil Asmat 2, Distrik Ayip menurut Termohon=552

suara, menurut Pemohon=848 suara, selisih 296 suara. Kabupaten Sarmi, Dapil Sarmi 2 Parpol Amanat Nasional perolehan suara menurut Termohon=393, menurut Pemohon=458, selisih 65 suara seperti yang terdapat pada halaman 55. Mohon dianggap dibacakan 56, 57, dan tabel total suara di halaman 58, total selisih 87 suara, angka V Petitum.

263. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SIESIUS MATURBONG

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06-KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Raktat ... dan ... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk mengisikan keanggotaan DPRD Provinsi Papua dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan umum ... umum pemilihan, sebagai berikut:
 1. Perolehan suara Pemohon Aner Maisini, S.H., M.H., untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua, mohon dianggap dibacakan. Table Papua 3.
 2. Perolehan suara Pemohon Aner Maisini, S.H., M.U., mengisi keanggotaan DPRD Provinsi Papua. (...)

264. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Majelis Hakim, ini di renvoi. Seharusnya bukan Aner Maisini, tetapi Imanuel Kogoya.

265. KETUA: ASWANTO

Halaman?

266. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Halaman 59, Majelis.

3. Untuk 1.1.3, perolehan suara Pemohon Calvin Haluk, S.IP., untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Papua. Calvin Haluk perolehan suara 15.542. Divenoi 15.542 suara. 1.1.3, perolehan suara Pemohon atas nama Irianti Medlama=22,852 suara. 1.1.4, mohon dianggap dibacakan. 1.1.5, mohon ... empat rat ... mohon dianggap dibacakan. 1.1.6, mohon dianggap dibacakan. 1.1.7, mohon dianggap dibacakan. 1.1.8, mohon dianggap dibacakan. 1.1.9, mohon dianggap dibacakan ... dibacakan. 1.1.10, mohon dianggap dibacakan. Majelis, ada penambahan 1.1.11 kabupaten atau perolehan suara Pemohon Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD Sarmi yang tidak terikut dalam permohonan tanggal 29 Mei, namun ada pada Permohonan awal. Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar menurut es ... sebagai berikut. Kabupaten Sarmi dan Dapil Sarmi 2 atas nama calon Yan Numbre perolehan suara 295. Partai Amanat Nasional=481 suara.
4. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini atau apa bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, waktu saya kembalikan.

267. KETUA: ASWANTO

Baik. Tadi kuasa yang satu (...)

268. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Baik, Majelis.

269. KETUA: ASWANTO

Untuk ... untuk dapil berapa?

270. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Dapil 1 Asmat.

271. KETUA: ASWANTO

Nah ini dapil asmat saya bacakan saja. Ini ada surat dari DPP PAN Nomor PANB/KU-SJ/2 ... 120/VII/2019 perihal Penarikan Pencabutan Permohonan Perkara PHPU Pileg 2019. Salah satu yang masuk di sini ... dibacakan semua, ya Prof? Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Barat. Dengan hormat, dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menyampaikan penarikan pencabutan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD Tahun 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi oleh DPP PAN kuasanya dengan rincian daftar perkara yang ditarik/dicabut sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, dapil DPRD Kabupaten Asmat 1 Provinsi Papua dengan registrasi Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. AP3 Nomor 193-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan, diucapkan terima kasih. Pemberi kuasa Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum, ditandatangani, Eddy Suparno Sekretaris Jendral ditandatangani. Ini permohonannya?

272. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya ... ya, Majelis. Yang perlu diketahui juga Pert ... yang pertama bahwa kita mengajukan permohonan ini mengatasnamakan perseorangan. Memang kita sudah pernah mengajukan surat persetujuan juga dari DPP PAN yang ditangani ... yang ditandatangani oleh ketum dan sekjen PAN itu surat persetujuan itu kita masukan itu pada tanggal 1 Juli. Dan pencabutan permohonan kemarin, kami selaku Kuasa Hukum sama sekali tidak dikonfirmasi dan Prinsipal kami pun tidak dikonfirmasi. Jadi pada saat kemarin itu kita mendapatkan e-mail dari MK. Ya, kamipun langsung konfirmasi juga dengan bagian administrasi di MK. Setelah hasil konfirmasi itu, alhasil Prinsipal kita, Saudara Abdul Ganing, langsung menyelesaikan persoalan internal itu di DPP semalam. Dan menurut keterangan beliau, beliau ada di bawah juga, katanya semuanya sudah selesai, sudah klir.

273. KETUA: ASWANTO

Selesai dalam arti apa itu?

274. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Tetap melanjutkan di (...)

275. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi ini suratnya DPP PAN belum ada. Kecuali, kami bisa menganggap itu klir (...)

276. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, Majelis.

277. KETUA: ASWANTO

Kalau surat ini disusul kembali (...)

278. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Oh, disusul kembali.

279. KETUA: ASWANTO

Atau dibatalkan khusus untuk Dapil I, Asmat. Sepanjang belum ada surat yang mencabut surat tanggal 4 Juli ini, yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jendral, kami menganggap bahwa perkara ini sudah dicabut, gitu.

280. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Baik, Majelis.

281. KETUA: ASWANTO

Ya, jelas, ya?

282. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Jelas.

283. KETUA: ASWANTO

Kecuali Anda membawa surat yang menurut Saudara sudah diselesaikan oleh Prinsipalnya tadi malam (...)

284. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Majelis, apakah masih ada waktu lagi?

285. KETUA: ASWANTO

Ndak.

286. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Kami mohon pertimbangannya, Majelis, minta waktu karena dari ... dari DPP PAN, dari Prinsipal kami itupun sudah selesai semuanya, Majelis. Hanya saja (...)

287. KETUA: ASWANTO

Ya, ya, maksudnya selesai itu harus ada surat, gitu ya.

288. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, ya, makanya kita (...)

289. KETUA: ASWANTO

Ada suratnya ndak?

290. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Yang ini hanya surat persetujuan yang tertanggal 27 (...)

291. KETUA: ASWANTO

27 (...)

292. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, bukan ... 27 (...)

293. KETUA: ASWANTO

Mei (...)

294. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya (...)

295. KETUA: ASWANTO

Mei?

296. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Benar.

297. KETUA: ASWANTO

Nah, inikan pencabutannya 4 Juli.

298. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, ya, kemarin, Majelis.

299. KETUA: ASWANTO

Ya, 4 Juli pencabutannya.

300. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ndak, maksud kita, Majelis. Kasih ... apakah ada waktu untuk (...)

301. KETUA: ASWANTO

Ndak, begini, inikan kita harus konsisten bahwa menurut undang-undang yang bisa mengajukan sengketa hasil itu adalah peserta

pemilu. Peserta pemilu dalam pileg itu adalah partai politik, yang mengajukan itu adalah partai politik. Tetapi memang, kita juga memberi peluang untuk perseorangan sepanjang ada rekomendasi dari DPP yang ditandatangani oleh ketua dan sekjen. Nah, mungkin Saudara kemarin ini secara perseorangan mengajukan? Kami tidak tahu apa ada rekomendasi dari (...)

302. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Sudah, Majelis. Itu yang kita lampirkan rekomennda ... surat persetujuan itu rekomendasi pada tanggal 1 Juli 2019.

303. KETUA: ASWANTO

Ada rekomendasinya? Ya, memang betul ada rekomendasi. Jadi Saudara bisa mengajukan secara perseorangan dan diberi rekomendasi oleh ketua umum dan sekjen. Tetapi, kemudian tanggal 4 Juli, ketua dan sekjen mencabut lagi.

304. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya.

305. KETUA: ASWANTO

Jadi, kami menganggap bahwa pencabutan ini resmi sepanjang belum ada pembatalan oleh ketua umum dan sekjen. Dan hari ini, ya, mestinya giliran Saudara. Tetapi karena tidak ada, sehingga kami tetap berpegang bahwa perkara ini sudah dicabut. Jelas, ya?

306. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Eenggak ada waktu lagi, Majelis, untuk kita bawakan surat bahwa persoalan ini sudah selesai? Ya, kita maksimalkan suratnya kita masukkan hari ini juga, Majelis.

307. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, maksudnya sudah selesai itu dalam artian bahwa (...)

308. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Artian mencabut kembali permohonan mereka yang mereka minta dicabutkan itu. Artinya bahwa pencabutan permohonan itu dibatalkan, seperti itu kira-kira, Yang Mulia.

309. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, artinya ini surat yang tanggal 4 Juli ini sudah dibatalkan lagi oleh pimpinan?

310. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, he em. Ya, ya, makanya surat itu ... mohon kita dikasih waktu untuk memberikan kembali.

311. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Gini, ya. Mestinya Anda kan sudah tahu masalah ini, dari kemarin, ya, ya?

312. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya.

313. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Padahal sudah ada e-mail juga dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Anda mau mengantisipasinya, mestinya tadi sebelum giliran Anda datang, surat yang mau membatalkan 4 Juli itu sudah ada. Oleh karena itu, Mahkamah berpegang kepada yang 4 Juli dan waktu Anda sebetulnya untuk menyampaikan permohonan sudah habis karena setelah ini akan ada giliran yang lain. Silakan Anda selesaikan permasalahan internal di partai Anda, dengan klien Anda, dengan partinya. Kami, Mahkamah tidak mengurus soal-soal yang begitu, bukti formal yang sampai ke kami bahwa DPP Partai Amanat Nasional mencabut ... apa namanya ... Permohonan untuk yang ditunjuk secara jelasnya di situ, ya.

314. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Baik, Majelis.

315. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih.

316. KETUA: ASWANTO

Jelas, ya? Kita pengesahan bukti dulu. Sekarang kita sahkan dulu bukti untuk perkara ... untuk ... mana ... PPP, ya? Untuk PPP Nomor Perkara 33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... eh ... 101/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya, 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, alat bukti yang diajukan DPRD Provinsi Dapil 1, buktinya P-1 sampai dengan P-11, betul, ya? Perkara 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Betul, ya.

Kemudian Dapil 2, DP-1 sampai ... DP-1 sampai dengan P ... sori ... bukan DP, P-1 sampai dengan P-72? Betul, ya.

Kemudian Kabupaten Tolikara, P-1 sampai dengan P-29? Betul, ya. Kemudian ada catatan-catatan, nanti komunikasi dengan bagian Kepaniteraan.

Kemudian untuk Partai Amanat Nasional atau PAN, Nomor Perkara 116/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bukti yang Saudara masukkan adalah untuk DPRD Provinsi, Dapil 2 Dapil 3, Dapil 6, itu P-1 sampai dengan P-166, betul ya? Eh, dan ada lagi tambahannya ... dan P-167 sampai P-335, betul, ya? Betul?

Untuk DPRD kabupaten, P-1 sampai dengan P-16 ... sampai dengan 61 ... sori ... sampai dengan 61.

317. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

318. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SERGIUS WEBISER

P-62, Majelis.

319. KETUA: ASWANTO

Ya, dicatatkan kami sampai 61.

320. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SERGIUS WEBISER

Kemarin kita masukkan satu lagi.

321. KETUA: ASWANTO

Oh (...)

322. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Tambahan.

323. KETUA: ASWANTO

Tambahan, ya?

324. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

325. KETUA: ASWANTO

P-62?

326. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

327. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi juga, ya?

328. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

329. KETUA: ASWANTO

Ada catatan-catatan, nanti komunikasi dengan bagian Kepaniteraan.

330. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Baik, Majelis.

331. KETUA: ASWANTO

Kemudian untuk PAN ya, masih untuk PAN ini. Ada bukti tambahan untuk Caleg Puncak Jaya, Dapil 4, atas nama Bekies Kogoya dan Eli Kogoya, P-62 DPRD, ya?

332. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SERGIUS WEBISER

Ya, benar.

333. KETUA: ASWANTO

Yang dimaksud tadi itu kan?

334. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SERGIUS WEBISER

Ya, Majelis.

335. KETUA: ASWANTO

Oke, oke. Kemudian untuk caleg DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 3 atas nama Aner Maisini, Anda memasukan P-18A, P-19A, P-20A, P-21A, P-22A, P-23A, P-24A, P-25A, P-20 ... P-26A, P-27A, P-27B, dan P-343.

336. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SERGIUS WEBISER

Ya, benar, Majelis (...)

337. KETUA: ASWANTO

Betul, ya. Kemudian Anda memasukan lagi bukti tambahan P-21A untuk DPRD, ya? Dan P-21B, P-21C, dan P-61A. Kemudian Anda memasukkan lagi, Dapil Papua 2, yaitu P-240, P-336, P-337, P-338, P-339, P-340, dan P-341?

338. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Betul, Majelis. Benar, Majelis.

339. KETUA: ASWANTO

Nah, kalau ada catatan-catatan, nanti komunikasi dengan (...)

340. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOHANIS H. MATURBONGS

Baik, Majelis.

341. KETUA: ASWANTO

Kita ... sudah diverifikasi dan betul adanya kita sa (...)

342. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Izin, Yang Mulia (...)

343. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan dahulu untuk ini, ya.

KETUK PALU 1X

344. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Yang Mulia, izin. PSI belum di (...)

345. KETUA: ASWANTO

Ya, ini kita sahkan. Biar tidak terlalu banyak, nanti lupa, gitu ya. PSI khawatir enggak disahkan buktinya.

Baik untuk Perkara Nomor 203/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Solidaritas Indonesia, daftar alat bukti itu P-1 sampai P-38. Dalam daftar Bukti P-15, tertulis tanggal 4 Mei 2019. Di dalam daftar alat buktinya, tapi dalam bukti fisik tertulis 5 Mei 2019. Yang mana yang betul ini? Ada perbedaan antara daftar alat bukti dan bukti fisik. P-15 itu di daftar alat bukti tertanggal 4 Mei, kemudian di dalam bukti fisik,

tertanggal 5 mei 2019. Yang mana yang betul? Nanti di ... di apa, di-cross-check nanti, ya.

Kemudian dalam daftar alat bukti P-32, tertulis salinan Kabupaten Puncak Jaya, namun pada bukti fisik tertulis Kabupaten Puncak, P-32. Lalu kemudian pada daftar alat bukti P-37 video, tertulis rekaman video keterangan dari ketua KPU Kabupaten Tolikara, namun pada bukti fisik, rekaman video tertulis P-36. Jadi, ada perbedaan P-37, lalu kemudian di bukti fisiknya malah P-36.

Nah, yang kita sahkan adalah yang tidak bermasalah. Yang bermasalah, P-32, kemudian P-37 itu nanti di ... apa ... dikonfirmasi kembali ke bagian Kepaniteraan, lalu kita cocokan dan kalau menurut hasil verifikasi kita sudah ndak ada masalah, baru kita sahkan.

Selebih da ... selebihnya itu kita sahkan, ya

KETUK PALU 1X

346. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Izin, Majelis.

347. KETUA: ASWANTO

Dari mana ini?

348. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Dari Pemohon 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

349. KETUA: ASWANTO

Oke, 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

350. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya. Mau bertanya tentang tambahan bukti setelah yang istilahnya sudah ini, artinya sampai kapan kami bisa tambahkan ... kami ada sekitar 17 bukti yang ada mau ditambahkan.

351. KETUA: ASWANTO

Nanti kan Anda masih punya giliran nanti untuk membawa ... untuk pembuktian, untuk membawa saksi atau ahli, gitu. Nah, pada saat itu Anda masih punya kesempatan untuk menambah bukti, ya? Nanti Saudara lihat jadwalnya tanggal berapa Anda kebagian waktu untuk membawa saksi, ahli, atau ... dengan kata lain pada saat proses pembuktian untuk Anda, ya?

352. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya. Artinya (...)

KETUA: ASWANTO

Paham, ya?

353. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Apakah bisa kami masukkan mendahului (...)

354. KETUA: ASWANTO

Bisa.

355. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Lewat sekretariat, begitu?

356. KETUA: ASWANTO

Terakhir maksud saya (...)

357. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya.

358. KETUA: ASWANTO

Terakhir Anda (...)

359. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya. Cukup jelas.

360. KETUA: ASWANTO

Boleh melakukan pada saat pembuktian.

361. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SELSIUS MATURBONGS

Ya. Ini cukup jelas.

362. KETUA: ASWANTO

Oke. Kalau mau memasukkan sekarang juga boleh. Lebih ... lebih cepat lebih bagus biar kita lebih awal memverifikasi. Ada lagi yang lain? Cukup jelas, ya? Baik. Kalau cukup jelas, ini soal agenda sidang.

Sidang perkara kita ini ditunda sampai tanggal ... hari Senin, tanggal 15 Juli. Jadi, sidang berikutnya adalah hari Senin, tanggal 15 Juli tahun 2019, pukul 13.30 WIB.

Agenda adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan bukti Termohon, bukti Bawaslu dan Pihak Terkait. Ya? Jelas, ya? Penyampaian ini sekaligus sebagai undangan untuk menghadiri sidang tanggal 15. Kita tidak mau lagi menerima alasan kami tidak mendapatkan undangan. Jadi, pemberitahuan ini sekaligus sebagai penyampaian atau panggilan atau undangan untuk menghadiri persidangan tanggal 15 Juli. Jelas, ya? Baik.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15:11 WIB

Jakarta, 9 Juli 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.